

# PEMBANGUNAN TATA RUANG KOTA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 1969-1984

Amelia Salsabila<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Pembangunan ruang kota pasca kemerdekaan di Kabupaten Purworejo baru dilaksanakan setelah lahirnya konsepsi perombakan wajah kota oleh Bupati Soeharto A.H. Konsepsi tersebut kemudian diwujudkan melalui Program Peremajaan Kota. Pada program ini pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pendanaan dalam pembangunan kota. Pembangunan yang dijalankan oleh Bupati Soeharto A.H (1969-1975) tidak sepenuhnya selesai hingga masa akhir jabatannya. Pembangunan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho (1976-1984). Pembangunan yang dilaksanakan pada masa Pemerintahan Bupati Kolonel Infantri Soepantho dibiayai melalui anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan program kredit dari bank-bank milik negara serta pelaksanaan pembangunan telah langsung ditangani oleh instansi dan dinas terkait. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kedua bupati membawa dampak pada naiknya pemasukan daerah dan Kabupaten Purworejo berhasil mendapatkan peringkat III pada PELITA II dan peringkat II pada PELITA III pada penghargaan Parasamy Purnakarya Nugraha Pelita se-Jawa Tengah.*

**Kata kunci:** *Tata Ruang Kota, Pembangunan Ruang Kota, Peremajaan Kota, Purworejo, Kutoarjo*

## *Abstract*

*The development of post-independence urban space in Purworejo Regency was only implemented after the conception of an overhaul of the city's face by Regent Soeharto A.H. The conception was then realized through the City Rejuvenation Program. In this program, the local government involved the community in the process of planning, implementation and funding in urban development. The development carried out by Regent Soeharto A.H (1969-1975) was not fully completed until the end of his term of office. The development was then continued by Regent Colonel Infantry Soepantho (1976-1984). The development carried out during the administration of Regent Colonel Infantry Soepantho was financed through a budget provided by the government and credit programs from state-owned banks and the implementation of development was directly handled by the relevant agencies and offices. The development that had been carried out by the two regents had an impact on the increase in regional income and Purworejo Regency managed to get third place in PELITA II and second place in PELITA III in the Parasamy Purnakarya Nugraha Pelita award in Central Java.*

**Keywords:** *Urban Spatial Planning, Urban Spatial Development, Urban Rejuvenation, Purworejo, Kutoarjo*

## **A. Pendahuluan**

Kota merupakan suatu daerah terbangun yang memiliki intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Penggunaan ruang yang cukup tinggi dalam kota tersebut ditimbulkan dari adanya proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia kemudian membangun ruang-ruang dalam kota.<sup>2</sup> Pada

dasarnya, kota tumbuh dan berkembang apabila tidak dipelihara dengan baik sebuah kota dapat mati.<sup>3</sup> Pembangunan kota apabila dalam pengembangannya tidak disertai penataan ruang yang baik, dapat menimbulkan permasalahan dalam kota.

Penataan ruang kota di Indonesia telah dilaksanakan sejak periode pra kolonial dengan melalui kekuasaan Keraton dalam membentuk tata kota tradisional. Pada tata kota tradisional, penataan pada ruang kota telah diwujudkan melalui pemisahan

<sup>1</sup> Alumni Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret.

<sup>2</sup> Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Wijanarka, *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 1

wilayah-wilayah dalam kota sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah.<sup>4</sup> Setelah masuknya Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia pola pengembangan ruang kota mulai berubah dan menyesuaikan kebutuhan administrasi kolonial tidak terkecuali pada tata ruang kota Kabupaten Purworejo. Pemerintahan Kolonial Belanda melalui kepemimpinan trah Cokronegoro, Kabupaten Purworejo telah berhasil melaksanakan pembangunan ruang kota dan membawa Kabupaten Purworejo ke dalam masa kejayaan. Keadaan tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 1919, keadaan Purworejo mulai mundur bersamaan dengan turunnya kekuasaan trah Cokronegoro dan ditutupnya beberapa fasilitas kota seperti *Hoogere Kweek School* dan Depo Lokomotif *Staatspoorwergen* pada tahun 1930.<sup>5</sup>

Pada masa Agresi Militer Belanda II, Kabupaten Purworejo mengalami kerusakan pada bangunan dan beberapa fasilitas kota. Kerusakan tersebut bukan merupakan kerusakan besar sehingga pembangunan yang dilaksanakan berupa renovasi bangunan dan fasilitas kota yang rusak saja. Pembangunan kota pasca kemerdekaan Indonesia memang lebih didominasi oleh kota-kota yang memiliki kerusakan parah dan sangat membutuhkan rekonstruksi dan pembangunan baru.<sup>6</sup> Pada tahun 1968, Kabupaten Purworejo belum melaksanakan pembangunan kota. Keadaan tersebut mendorong Bupati Soeharto A.H untuk melaksanakan pembangunan ruang kota melalui Program Peremajaan Kota.

Pembangunan ruang kota yang telah dilaksanakan oleh Bupati Soeharto A.H (1969-

1975) tidak selesai hingga akhir masa jabatannya. Pembangunan ruang kota di Kabupaten Purworejo kemudian dilanjutkan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho (1976-1984). Bupati Kolonel Infantri Soepantho yang melanjutkan pembangunan dari bupati sebelumnya ini, membawa pembangunan yang cukup kontras baik dalam program, pelaksanaan dan pendanaan dalam pembangunan ruang kota di Kabupaten Purworejo.

## B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang tahapannya meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).<sup>7</sup> Tahapan pertama merupakan langkah awal dalam melaksanakan penelitian yaitu pemilihan topik. Topik yang diambil dalam penelitian ini secara garis besar mengarah pada tema sejarah kota, khususnya pada bidang perkembangan tata ruang kota. Penelitian ini akan menyoroti interaksi antara manusia dan alam sekitarnya. Interaksi yang terjadi antara manusia dan alam akan mengakibatkan perubahan ekologi apabila salah satu komponen itu mengalami perubahan.<sup>8</sup> Setelah menentukan topik, tahapan selanjutnya adalah pengumpulan sumber. Sumber-sumber yang digunakan mencakup sumber primer berupa dokumen arsip dan sumber sekunder yaitu studi kepustakaan.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sumber tertulis berupa dokumen arsip yang diperoleh

---

<sup>4</sup> Rony Gunawan Sunaryo, *et al*, "Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi Ruang Kota Jawa Periode 1600-1942", *Prosiding Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP 3)*, "Manusia dan Ruang dalam Arsitektur dan Perencanaan" (Yogyakarta: Program Studi Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik, UGM, 2014), hlm. 327-328.

<sup>5</sup> Peter Carey, *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), hlm. 217.

<sup>6</sup> Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, *Sejarah Penataan Ruang Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003), hlm.14.

<sup>7</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm 69-80.

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 64.

melalui Depo Arsip Kabupaten Purworejo, Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo dan Monumen Pers Nasional. Arsip-arsip yang digunakan yaitu: Buku laporan mengenai Anggaran Keuangan Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1960, Arsip Statis Sekretaris Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo, Arsip Statis Sekretaris Daerah Tingkat II Kabupaten Purworejo: Bagian Ekonomi, Arsip Statis Bupati Purworejo Drs. Soeharto A.H 1967-1975, Arsip Statis Bupati Purworejo Kolonel Infantri Soepantho 1975-1985, Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Purworejo Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 1984/1985, Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Masa Jabatan 1980-1985, Mengenal Kecamatan Kutoarjo Tahun 1978-1983, dan surat kabar *Kompas* terbitan tanggal 2 Mei 1969. Pengumpulan sumber tertulis seperti buku diperoleh melalui *Digital Library* milik Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Ghratama Pustaka Yogyakarta dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.

Sumber-sumber yang telah terkumpul akan diteliti terlebih dahulu melalui kritik sumber. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik. Baik melalui kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik intern berguna untuk menguji kredibilitas data, data tersebut bisa dikatakan kredibel apabila di dalamnya memuat fakta dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik ekstern dilakukan dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan, pengecekan

kualitas bahan apakah sesuai dengan teknologi pada masa tersebut, dan memastikan apakah sumber yang diperoleh asli atau salinan. Setelah melalui tahapan ini, sumber-sumber penulisan kemudian akan menjadi fakta sejarah.

Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita, sehingga fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah. Pada tahap ini sumber-sumber yang diperoleh akan ditafsirkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah agar terkait dan berkesinambungan. Fakta-fakta yang telah tersusun dan membentuk cerita sejarah kemudian akan ditulis menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.

### C. Awal Mula Pembentukan Kabupaten Purworejo

Pembentukan Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari peristiwa Perang Jawa. Setelah berakhirnya perang, Pemerintah Kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan di Bagelen dari wilayah Kasunanan Surakarta kemudian menjadikan wilayah Bagelen sebagai salah satu Karesidenan Belanda yang baru yaitu Karesidenan Bagelen dengan Brengkelan sebagai pusat kota administrasinya. Cokronegoro I yang pada saat terjadinya perjanjian tersebut dibuat sedang menjabat sebagai Tumenggung Brengkelan (Tanggung) dengan nama KRT Cokro Joyo, kemudian diangkat menjadi bupati oleh Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>9</sup> Pada 18 Desember 1830, Karesidenan Bagelen dibagi ke dalam empat kabupaten yaitu Brengkelan (Purworejo), Semawung (Kutoarjo), Ungaran (Kebumen) dan Karang Duhur (Sedayu). Pembentukan Karesidenan Bagelen terhitung pada tanggal 22 Agustus 1831 dan sejak saat itu Cokronegoro I

---

<sup>9</sup> Atas S Danusubroto, *RAA Cokronegoro I (1831-1856): Pendiri Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: Yayasan Singawijayan, 2008), hlm. 68-72.

menjadi Bupati Purworejo dengan gelar RAA Cokronegoro I.<sup>10</sup>

Bupati, Cokronegoro I menggunakan pengalaman administratifnya saat berada di Keraton Kasunanan Surakarta dalam membangun Kabupaten Purworejo. Tidak hanya berkembang pada bidang militer, Kabupaten Purworejo juga berkembang pada bidang pendidikan dan infrastruktur kotanya. Bupati Cokronegoro I sebagai bupati pertama Kabupaten Purworejo, berusaha membangun Purworejo agar layak menjadi ibu kota bagi Karesiden Bagelen.

Kedudukan Kota Purworejo sebagai ibu kota Karesidenan Bagelen harus berhenti pada tahun 1901. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu dari empat kabupaten dari karesidenan baru yang bertahan sampai pada tahun 1901 saat Bagelen dilebur ke dalam Karesidenan Kedu.<sup>11</sup> Sejak saat itulah, kedudukan Kabupaten Purworejo hanya menjadi kabupaten biasa, dengan demikian Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kutoarjo bergabung menjadi bagian dari Karesidenan Kedu. Tidak lama setelah bergabung ke dalam Karesidenan Kedu, pada tahun 1933 Kabupaten Kutoarjo yang pada saat itu berstatus sebagai kabupaten harus turun status menjadi kawedanan dan bergabung ke dalam wilayah Kabupaten Purworejo demikian juga dengan pusat pemerintahannya yang terpusat di Kota Purworejo.<sup>12</sup>

#### **D. Kabupaten Purworejo Pasca Pemerintahan Kolonial**

Pasca kemerdekaan keadaan administrasi, ekonomi dan sosial Kabupaten Purworejo cenderung buruk. Kabupaten Purworejo mengalami tekanan yang besar di saat adanya Agresi Militer Belanda II, hal ini

dikarenakan letak Kabupaten Purworejo yang sangat dekat dengan Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pada masa tersebut banyak korban jiwa berjatuhan dan beberapa fasilitas kota ikut rusak. Bahkan kota Purworejo sempat diduduki sehingga aparat Pemerintahan Republik Indonesia dialihkan ke Bruno bersama dengan bupati dan patih.<sup>13</sup> Ketidakstabilan keadaan politik menjadikan bupati tidak dapat membangun Kabupaten Purworejo pasca kemerdekaan dan baru setelah keadaan aman kegiatan pemerintahan kembali dialihkan ke dalam kota.

Keadaan ruang kota Kabupaten Purworejo tidak mengalami kerusakan yang besar dan mengharuskan terjadinya perombakan dalam tata ruang kotanya. Keadaan tersebut cukup berbeda pada beberapa kota besar di Jawa yang terkena dampak besar pasca perang sehingga melakukan perombakan dan pembangunan dalam kota. Bupati-bupati yang menjabat setelah masa kemerdekaan belum memiliki kesempatan untuk melakukan penataan ruang kota karena terfokus pada pemulihan kestabilan keadaan politik, penanganan bencana alam dan membuka daerah yang masih terisolir. Pembangunan dalam ruang kota tidak terlalu menjadi fokus utama bagi para bupati-bupati sehingga sampai pada akhir tahun 1960-an Kabupaten Purworejo belum melaksanakan penataan ruang kota.

Terhambatnya pembangunan dalam wajah kota di Kabupaten Purworejo menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Drs. Soeharto A.H yang saat itu menjabat sebagai Bupati Purworejo. Kekhawatiran tersebut disebabkan oleh pesatnya perombakan wajah kota di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Kota Brebes, Slawi, Tegal dan Banyumas.<sup>14</sup> Pembangunan yang dilakukan

<sup>10</sup> Peter Carey., *op.cit.*, hlm. 199-205.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>12</sup> Musadad, "Dari Permukiman Benteng ke Kota Administrasi: Tata Ruang Kota Purworejo tahun 1800-1930", *Tesis*, Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora

(Ilmu Sejarah) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2001, hlm. 34.

<sup>13</sup> Atas S Danusubroto, *op.cit.*, hlm 169.

<sup>14</sup> *Surat Bupati kepada anggota DPRD-GR Kabupaten Purworejo tanggal 8 November 1968 perihal*

oleh daerah-daerah tersebut menyebabkan bupati merasa bahwa keadaan kota Purworejo cukup tertinggal sehingga perlu untuk segera melaksanakan perombakan wajah kota. Melalui surat bupati yang ditujukan kepada anggota DPRD-GR, pada tahun 1968 Bupati Soeharto A.H mengajukan konsepsi perombakan wajah kota Kabupaten Purworejo dan dengan surat tersebut akan menjadi titik awal dalam pelaksanaan pembangunan tata ruang kota di Kabupaten Purworejo.

#### **E. Pembangunan Ruang Kota Kabupaten Purworejo Masa Pemerintahan Bupati Soeharto A.H (1969-1975)**

Konsepsi perombakan wajah kota oleh Bupati Soeharto A.H tidak mengubah keseluruhan bentuk tata ruang kota Purworejo yang telah ada sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Perombakan tersebut dilaksanakan hanya untuk merapikan ruang kota berupa penyeragaman wajah bangunan. Penyeragaman tersebut nantinya akan diikuti dengan pemisahan wilayah pertokoan dan perumahan dalam kota. Tidak hanya penyeragaman wajah kota, bupati juga melaksanakan penataan pada fasilitas-fasilitas kota yang berlokasi di wilayah yang kurang sesuai dengan fungsi wilayahnya sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati Soeharto A.H adalah penataan kembali ruang kota.

Melihat konsepsi pembangunan yang dibuat oleh bupati, DPRD-GR menerima baik rencana pembangunan. Melalui rapat panitia musyawarah pada tanggal 21 Januari 1969, anggota DPRD-GR menyetujui konsepsi pembangunan yang diajukan bupati. DPRD-GR menyerahkan seluruh pelaksanaan pembangunan ruang kota kepada bupati,

sehingga dalam proyek ini bupati memiliki tugas penting dalam kelangsungan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membentuk sebuah panitia yang nantinya panitia tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan ruang kota yang telah dirancang oleh bupati bersama dengan DPRD-GR.

Panitia tersebut dibentuk pada tanggal 11 Februari 1969 dan diberi nama Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo. Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo terdiri dari unsur-unsur Pimpinan Aparatur Daerah, Anggota DPRD-GR dengan dibantu wakil-wakil dari berbagai golongan masyarakat, masyarakat yang melaksanakan pembangunan kota, instansi-instansi yang memiliki hubungan erat dengan urusan pembangunan materil dan tenaga ahli yang ada di Kabupaten Purworejo. Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas panitia akan dibebankan kepada panitia dengan bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Purworejo.<sup>15</sup>

Lokasi yang terkena Program Peremajaan Kota adalah wilayah-wilayah kota yang ramai akan aktivitas masyarakat. Pada Kabupaten Purworejo terdapat dua wilayah yang ramai yaitu ibu kota Kabupaten Purworejo dan Kota Kawedanan Kutoarjo. Pembangunan kota difokuskan pada sudut-sudut kota yang ramai seperti pada deretan bangunan pertokoan, area pasar dan bangunan di sepanjang tepi jalan raya. Lokasi yang dilaksanakan pembangunan adalah wilayah kota yaitu di Kota Purworejo pada bangunan di area Jl. A. Yani dan Kota Kutoarjo pada bangunan di area Jl. Ketawang-Jl. Pasar dan Jl. Raya Kutoarjo. Panitia Peremajaan Kota kemudian membagi wilayah tersebut ke dalam dua wilayah yaitu kompleks pertokoan dan kompleks perumahan.<sup>16</sup>

---

*perubahan wajah kota Purworejo No. PUOD.B.1040/L/68, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

<sup>15</sup> *Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Purworejo tanggal 11 Februari 1969 Nomor:*

*PUOD.B.1/69. Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

<sup>16</sup> *Turunan Verslag Rapat Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo tanggal 27 Mei 1969, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

Pada bangunan rumah yang berada di kompleks pertokoan, rumah-rumah tersebut apabila tidak dibangun seperti pada ketentuan bangunan pertokoan maka harus mundur paling sedikit sejauh dua meter dari garis *rooi* dan juga diharuskan membangun pagar pada halaman rumah yang berada tepat pada garis *rooi*. Bangunan-bangunan warung diatur seperti bangunan rumah biasa dengan ketentuan bagian bangunan yang terlihat dari jalan besar harus dibuat dari pasangan tembok dengan catatan: rapi, rajin dan indah. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi warung-warung yang terletak di luar kompleks pertokoan. Warung-warung yang berada di dalam kompleks pertokoan harus tetap mengikuti syarat-syarat ketentuan bangunan pertokoan.<sup>17</sup>

Pada setiap toko yang di mukanya terdapat selokan, toko tersebut diharuskan membangun jembatan yang kuat, rapi dan indah. Kompleks pertokoan juga diharuskan memasang tiang bendera khusus yang dipasang pada *leufel* (kanopi) sebelah kanan dan bahan pembuatan *leufel* diharuskan berbahan beton. Pada warung-warung yang terletak di *berm* (bahu jalan) di Jalan Raya Kutoarjo (antara Kali Jali sampai Kali Anyar), para penghuni warung akan direlokasi ke kompleks warung milik pemerintah daerah yang terletak di sebelah Barat Pasar Kutoarjo tepatnya pada warung-warung yang ada di Koplak Dokar Pasar Kutoarjo.<sup>18</sup> Biaya pelaksanaan pembangunan Peremajaan Kota dipikul oleh masing-masing penghuni bangunan yang melaksanakan pembangunan dengan pola gambar ukuran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.<sup>19</sup> Selain

melalui biaya pribadi, pembiayaan juga didapatkan melalui sumbangan dana pembangunan yang didapat melalui masyarakat, kegiatan hiburan, proyek serta usaha lotre yang berada di dalam daerah Kabupaten Purworejo.<sup>20</sup>

Perencanaan yang telah dibuat oleh bupati dan panitia kurang mendapat respon oleh masyarakat yang menjalankan pembangunan yaitu penghuni bangunan. Penghuni bangunan sebenarnya ingin menolak pembangunan dikarenakan beban finansial yang akan mereka tanggung, namun mereka tidak berani menyuarakan pendapat karena takut akan dicap sebagai anggota G30S sehingga para penghuni hanya bisa meminta keringanan waktu.<sup>21</sup> Selain kurangnya respon pada penghuni bangunan, berkembang isu-isu terkait penundaan dan pengukuran kembali garis *rooi* sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan kota.

Kurangnya respon masyarakat terhadap Program Peremajaan Kota menyebabkan pembangunan ruang kota harus mundur hingga tahun 1972. Pelaksanaan pembangunan baru mulai terlihat perkembangannya pada tahun 1972 meski pun pembangunan tersebut masih belum mencapai hasil yang diharapkan.<sup>22</sup> Pemerintah daerah dan panitia kemudian berencana melebarkan jalan dan membangun trotoir di sepanjang Jl. A. Yani sehingga para penghuni bangunan akan terdesak untuk ikut melaksanakan pembangunan. Pembangunan trotoir yang dilaksanakan di sepanjang Jl. A. Yani membuahkan hasil. Pada tahun 1973 para penghuni telah melaksanakan

<sup>17</sup> Turunan Verslag Rapat Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo tanggal 27 Mei 1969, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

<sup>18</sup> Turunan Verslag Rapat Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo tanggal 27 Mei 1969, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

<sup>19</sup> Surat Bupati kepada anggota DPRD-GR Kabupaten Purworejo tanggal 8 November 1968 perihal perubahan wajah kota Purworejo No.

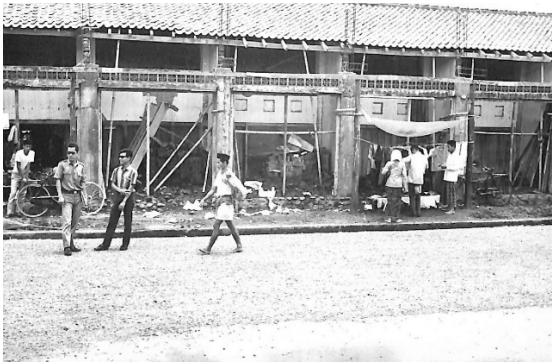
PUOD.B.1040/L/68, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

<sup>20</sup> Turunan Verslag Rapat Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo tanggal 27 Mei 1969, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

<sup>21</sup> "Kompasiana", *Kompas*, 2 Mei 1969.

<sup>22</sup> Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Purworejo tanggal 11 Januari 1972 No. Sk.Hukm.B.5/VIII/72, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

pembangunan rumah kios/pertokoan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan. Pembangunan yang dilaksanakan Bupati Soeharto A.H tidak hanya pada penyeragaman wajah bangunan dalam kota melainkan juga pemindahan *standplaats* (terminal) bus Purworejo dan Kutoarjo serta peremajaan alun-alun Kota Purworejo. Pemerintah daerah kemudian juga melaksanakan penataan dan pembangunan di Pasar Kutoarjo.



**Gambar. 1**

Pelaksanaan Peremajaan Kota di Pecinan (Jl. A. Yani) tahun 1973

Sumber: Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo

Selama masa pembangunan kota yang dilaksanakan terdapat permasalahan seperti kurangnya respon masyarakat dan juga pendanaan. Selain kedua permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yang terjadi yaitu meningkatnya kasus sengketa tanah dan bangunan. Meski telah melaksanakan penataan kota, masyarakat masih belum memahami dengan baik terkait pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah karena semasa pembangunan ruang kota masyarakat membangun bangunan yang menyalahi aturan di dalam kota. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan gapura di jalan masuk Desa Baledono oleh pemerintah desa dan munculnya para pedagang liar di tepi jalan dalam kota.

#### F. Pembangunan Ruang Kota Pada Masa Pemerintahan Bupati Kolonel Infantri Soepantho (1976-1984)

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati Soeharto A.H belum sepenuhnya selesai hingga masa akhir kepemimpinannya. Pembangunan ruang kota kemudian dilanjutkan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho. Dalam pembangunan yang dilaksanakan pada periode ini, pemerintah daerah tidak lagi menjalankan Program Peremajaan Kota dan dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menangani sendiri pembangunan. Dana yang digunakan telah ditanggung melalui pengalokasian anggaran daerah. Tidak hanya itu, pendanaan pembangunan juga melalui kredit yang disediakan oleh bank-bank milik negara. Meski terdapat perbedaan dalam pembangunannya, pemerintah daerah masih mempertahankan beberapa peraturan dalam pembangunan kota sebelumnya seperti pada peraturan terkait garis bangunan (*rooi lijn*) dan masih adanya sumbangan pembangunan yang ditarik oleh pemerintah daerah.

Pembangunan pertama yang dilaksanakan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho adalah pembangunan koplak dokar, pertokoan di ex-koplak dokar, dan Pasar Induk Kutoarjo. Pemerintah daerah mengajukan kredit Inpres kepada Gubernur Tingkat I Jawa Tengah. Selain membangun Pasar Kutoarjo, pemerintah daerah juga membangun Pasar Baledono II (Kongsi) karena sudah tidak dapat menampung para pedagang.

Pemerintah daerah kemudian turut melaksanakan pembangunan terkait kebutuhan permukiman dalam kota. Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kredit pembangunan yang

disediakan oleh Bank BTN.<sup>23</sup> Pembangunan permukiman ditujukan untuk para pegawai negeri dan RSUD Purworejo juga turut melaksanakan membangun perumahan bagi paramedis menggunakan dana APBD. Selain permukiman, pemerintah daerah juga memberikan bantuan pemugaran atap welit pada rumah yang berada di tepi jalan protokol. Pemerintah daerah juga melaksanakan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota melalui PDAM.<sup>24</sup>

Bupati Kolonel Infantri Soepantho kemudian membangun fasilitas transportasi dalam kota seperti perbaikan jalan, pemeliharaan jalan serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga mengatur lokasi-lokasi parkir dan pemberhentian dalam kota.<sup>25</sup> Hal tersebut dikarenakan naiknya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan umum dalam kota sehingga pengguna jalan ikut meningkat. Pada transportasi kota yang tersedia bus dan kereta api.

Permasalahan dalam kota selama masa kepemimpinan Bupati Soepantho adalah perjudian dalam kota khususnya yang terjadi di pasar. Perjudian mulai dilarang dengan dikeluarkannya Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Nomor 54 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Meski melarang perjudian pemerintah masih melaksanakan perjudian dengan mengganti nama lotre menjadi sumbangan. Selain perjudian, terdapat permasalahan kota lain terkait dengan kurangnya ketertiban

pengguna jalan raya di dalam kota. Dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 1983 hingga tahun 1984 terjadi kasus pelanggaran yang naik mencapai 83,46% persen hanya dalam waktu satu tahun.<sup>26</sup>

Pembangunan kota yang dijalankan oleh Bupati Soeharto A.H dan Bupati Kolonel Infantri Soepantho membawa dampak pada pendapatan daerah. Selain itu, pesatnya pembangunan yang dijalankan juga berdampak pada semakin teraturnya kota serta meningkatnya fasilitas kota. Hal tersebut dibuktikan dengan secara berturut Kabupaten Purworejo berhasil mendapat peringkat III untuk Pelita II dan peringkat II untuk Pelita III dalam anugrah Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita se-Jawa Tengah.<sup>27</sup>

## G. Kesimpulan

Perkembangan tata ruang kota di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Beragam fasilitas dan prasarana kota dibangun guna memenuhi kebutuhan bagi masyarakat penghuni kota. Pasca kemerdekaan Indonesia keadaan tata ruang kota di Kabupaten Purworejo belum mengalami banyak perubahan. Meski mengalami kerusakan bangunan dan fasilitas kota, pembangunan yang dilaksanakan berupa renovasi bagian kerusakan saja. Pada tahun 1968 perubahan yang terjadi di dalam kota hanyalah pada penambahan bangunan dan perubahan kepemilikan fasilitas kota akibat dari adanya nasionalisasi.

Keadaan tersebut mendorong Bupati Kabupaten Purworejo, Soeharto A.H untuk

---

<sup>23</sup> Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo tentang Rencana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri yang Diajukan oleh PT Sinar Waluyo tanggal 15 Juni 1978 Nomor: SK.Hukm.B.32/VI/1978 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 35 Seri: D Tahun: 1978 Nomor: 20, Koleksi Perpustakaan Daerah Purworejo.

<sup>24</sup> Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Masa Jabatan 1980-1985, Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.

<sup>25</sup> Turunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo tentang Penunjukan Tempat-tempat Parkir/Berhenti Kendaraan Dalam Kota Purworejo tanggal 17 Mei 1980 Nomor: 551.2/521/1980, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

<sup>26</sup> Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Masa Jabatan 1980-1985, Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.

<sup>27</sup> Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Masa Jabatan 1980-1985, Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.

melaksanakan pembangunan ruang kota melalui Program Peremajaan Kota. Pembangunan yang dijalankan oleh Bupati Soeharto A.H melibatkan secara langsung partisipasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pada pendanaan pembangunan, namun keberjalanan pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik. Pembangunan yang telah direncanakan harus mundur dari waktu yang telah ditetapkan karena kurangnya kesiapan baik pada panitia dan juga masyarakat yang menjalankan pembangunan. Hingga akhir masa jabatannya Bupati Soeharto A.H belum menyelesaikan pembangunan yang dimulainya.

Pembangunan ruang kota kemudian dilanjutkan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho. Meski yang dilaksanakannya adalah melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh bupati sebelumnya, pembangunan yang dijalankan cukup kontras dengan yang telah dilaksanakan pada masa Bupati Soeharto A.H. Pembangunan yang akan dilaksanakan telah menjadi tanggung jawab dari instansi dan dinas terkait dalam kota. Tidak hanya itu, pendanaan pembangunan telah seluruhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah dan tidak lagi pada masyarakat melainkan melalui anggaran yang disediakan daerah dan program kredit yang disediakan oleh bank-bank milik negara. Penggunaan program kredit untuk mendapatkan modal pembangunan membawa pembangunan yang dijalankan oleh Bupati Kolonel Infantri Soepantho lebih terencana dan terstruktur. Hal tersebut dikarenakan pada saat akan mengajukan pinjaman kredit pemerintah daerah harus menganalisis kebutuhan pembangunan dan rancangan anggaran pembangunan kepada gubernur.

Meski terdapat perbedaan diantara pembangunan yang dijalankan oleh kedua bupati. Masing-masing bupati memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan ruang kota di Kabupaten

Purworejo. Pembangunan yang dijalankan tidak hanya meningkatkan fasilitas dan prasarana kota, namun juga meningkatkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Purworejo. Selama masa pembangunan kota, Kabupaten Purworejo berhasil mendapatkan peringkat III untuk Pelita II dan peringkat II untuk Pelita III pada penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita se-Jawa Tengah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Arsip**

*Kesimpulan rapat panitia musyawarah DPRD-GR Kabupaten Purworejo dengan Bupati Purworejo tanggal 13 Desember 1968 No. Sto.88/PUOD/68, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

*Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo Masa Jabatan 1980-1985, Koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.*

*Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Purworejo tanggal 11 Januari 1972 No. Sk.Hukm.B.5/VIII/72, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

*Surat Bupati kepada anggota DPRD-GR Kabupaten Purworejo tanggal 8 November 1968 perihal perubahan wajah kota Purworejo No. PUOD.B.1040/L/68, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

*Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Purworejo tanggal 11 Februari 1969 Nomor: PUOD.B.1/69. Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.*

*Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo tentang Rencana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri yang Diajukan oleh PT Sinar Waluyo tanggal 15 Juni 1978 Nomor: SK.Hukm.B.32/VI/1978 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 35 Seri: D Tahun: 1978 Nomor: 20, Koleksi Perpustakaan Daerah Purworejo.*

*Turunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purworejo tentang Penunjukan Tempat-tempat Parkir/Berhenti Kendaraan Dalam Kota Purworejo tanggal 17 Mei 1980 Nomor: 551.2/521/1980*, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

*Turunan Verslag Rapat Panitia Peremajaan Kota Kabupaten Purworejo tanggal 27 Mei 1969*, Koleksi Depo Arsip Kabupaten Purworejo.

Kota Jawa Periode 1600-1942”, disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP 3) dengan tema “Manusia dan Ruang dalam Arsitektur dan Perencanaan”. Yogyakarta: Program Studi Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik, UGM, 2014.

### **Surat Kabar**

*Kompas*, 2 Mei 1969

### **Buku**

Carey, Peter. 2017. *Sisi Lain Diponegoro: Babad Kedung Kebo dan Historiografi Perang Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Danusubroto. Atas S. 2008. *RAA Cokronegoro I (1831-1856): Pendiri Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: Yayasan Singawijayan.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. *Sejarah Penataan Ruang Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng.

\_\_\_\_\_. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wijanarka. 2007. *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Yunus, Hadi Sabari. 2015. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

### **Artikel**

Musadad, “Dari Permukiman Benteng ke Kota Administrasi: Tata Ruang Kota Purworejo tahun 1800-1930”, *Tesis*, Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora (Ilmu Sejarah) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2001.

Rony Gunawan Sunaryo, *et al*, “Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi Ruang